

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan. RENSTRA berfungsi sebagai penjabaran komprehensif dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, serta menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyusunannya melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan guna memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap isu strategis, perumusan kebijakan yang efektif, dan terciptanya sinergi antarprogram.

Sebagai dokumen perencanaan, RENSTRA Perangkat Daerah tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dokumen ini harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 - 2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025 - 2029, serta RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029. Selain itu, RENSTRA juga harus memperhatikan dan menyelaraskan diri dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) dan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Jawa timur, khususnya dalam sektor lingkungan hidup, guna menjamin konsistensi dan integrasi kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah.

Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar memandang perlu untuk menyusun RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029 guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk menetapkan arah kebijakan, strategi, dan kerangka pendanaan yang tepat, sekaligus memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan operasional tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas lingkungan Hidup dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;

31. Peraturan Wali Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029..

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat rekapitulasi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tingkat capaian kinerja indikator tujuan, indikator sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Perangkat Daerah selama tahun 2022-2025.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah dan bentuk layanan yang diberikan Perangkat Daerah.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Memuat mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan baik dalam internal Pemerintah Kota Blitar maupun pihak eksternal terkait pelayanan dan bentuk kemitraannya (jikalau ada)

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Memuat dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (jikalau ada)

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Memuat kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (jikalau ada). Kerjasama yang dimasukkan dalam bab ini mencakup kerjasama yang melibatkan daerah lain dan dibuktikan dengan perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak-pihak terkait.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Memuat potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Potensi daerah dirumuskan dengan cara menyinkronkan permasalahan dan isu menjadi kalimat positif.

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah subbab 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Memuat telaah isu strategis KLHS dikaitkan dengan alternatif skenario dan rekomendasi

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai isu global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tak langsung.

2.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat review atas Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional dan Regional). Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2025–2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi memuat rencana komprehensif perangkat daerah dalam menghadapi isu strategis perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang didalamnya memuat penahapan Renstra yang disinronkan dengan penahapan RPJMD Tahun 2025-2029, kegiatan prioritas dan lokusnya. Arah kebijakan memuat rangkaian kerja yang selaras dengan strategi yang menjadi operasionalisasi NSPK, dicascadingkan dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah hasil cascading tujuan, sasaran, outcome dan output sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 memuat daftar program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Dalam sub bab ini juga memuat daftar subkegiatan prioritas perangkat daerah yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan perangkat daerah mulai tahun 2025 sampai tahun 2030. Selain itu pada subbab ini juga memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri yang mengatur tentang IKK

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
- d. perumusan kebijakan teknis pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan;
- f. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan peyuluhan lingkungan hidup di masyarakat;
- g. penyusunan kebijakan teknis penghargaan lingkungan hidup di masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan persampahan tingkat kota;
- i. penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- j. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidangLingkungan Hidup;
- k. pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- l. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- m. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Dinas;
- n. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- o. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- r. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup;
- t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Lingkungan Hidup secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

- u. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Pejabat Fungsional.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan dilingkungan Dinas. Untuk membantu tugas – tugas dari Sekretariat maka dibantu oleh subbagian-bagian.

- Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kebijakan teknis urusan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- p. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- q. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- r. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- t. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;

- u. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan lingkungan hidup;
- v. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- w. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- x. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Lingkungan Hidup secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
- aa. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar terdiri atas 3 bidang, yaitu :

1. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan atau disingkat dengan P3KL, yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Tata Lingkungan. Fungsi yang melekat pada bidang ini meliputi :

- a. penyusunan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif/disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH);
- i. penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- j. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- k. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- l. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah;
- m. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- n. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- o. pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- p. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan, persetujuan lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
- q. penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisis mengenai Dampak

Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan);

- r. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup;
- s. pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
- t. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- u. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
- v. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- w. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- x. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- y. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- z. sosialisasi tata cara pengaduan;
- aa. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
- bb. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan;
- cc. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan;
- dd. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan;
- ee. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- ff. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- gg. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- hh. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- jj. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- kk. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ll. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- mm. pengembangan data dan akses informasi lingkungan;
- nn. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- oo. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- pp. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- qq. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- rr. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- ss. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- tt. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- uu. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3. Fungsi yang melekat pada Kepala Bidang ini meliputi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu;
- f. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- g. perumusan kebijakan penanganan sampah di kota;
- h. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- i. pembangunan sarana prasarana persampahan;
- j. penyediaan sarpras penanganan dan pengurangan sampah;
- k. pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah;
- l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
- n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- p. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- q. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- u. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- w. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
- x. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
- y. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- z. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
- aa. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
- bb. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- cc. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- dd. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah;
- ee. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ff. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- gg. pembentukan tim penilai pendukung penghargaan adipura;
- hh. melakukan dukungan program pemberian penghargaan adipura;

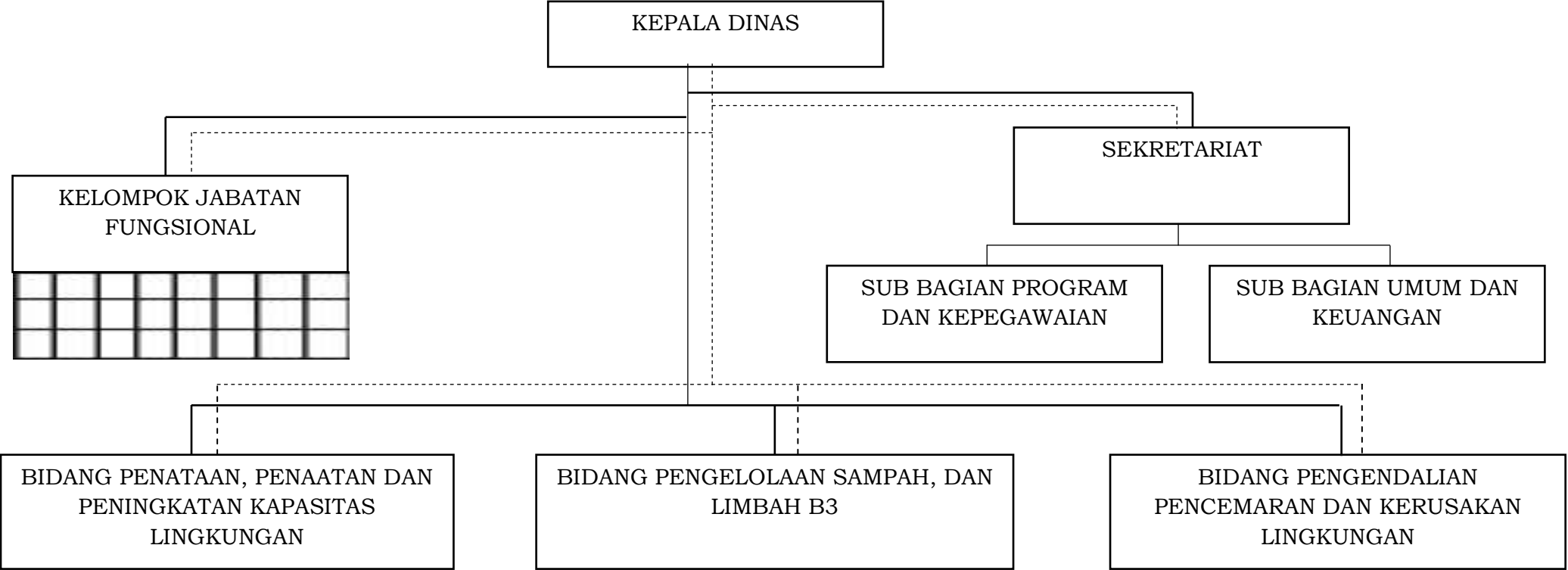
- ii. melaksanakan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- jj. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebersihan kota;
- kk. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- ll. melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- mm. sosialisasi dan pengembangan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah;
- nn. pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- oo. fasilitasi kegiatan pembersihan sampah di jalan-jalan dan tempat-tempat umum;
- pp. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Fungsi yang melekat pada Kepala Bidang ini meliputi :

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan;
- l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- v. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- x. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- z. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- aa. pelaksanaan pembangunan dan penataan taman, monumen, tugu dan air mancur;
- bb. pelaksanaan, pengadaan sarana dan prasarana taman kota;
- cc. pelaksanaan inventarisasi jenis, jumlah satuan, luas taman, monumen, tugu dan air mancur;
- dd. pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan taman, monumen, tugu dan air mancur;
- ee. pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan kelistrikan taman kota;
- ff. pengumpulan, pengelolaan dan pelaksanaan pembibitan tanaman;
- gg. pengawasan dan pengendalian proses pembibitan tanaman;
- hh. melakukan pemeliharaan terhadap jalur hijau dan taman lainnya;
- ii. menyiapkan prasarana beserta kelengkapannya dalam rangka pemeliharaan terhadap jalur hijau dan taman lainnya;
- jj. pengelolaan penjualan hasil penebangan pohon dan hasil pemanfaatan sarana fasilitas umum seperti kebun rojo dan taman kota lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- kk. melakukan koordinasi pengembangan penghijauan kota;
- ll. perumusan kebijakan penghijauan kota;
- mm. pemantauan dan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
- nn. pembinaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- cc. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Gambar 2.1 SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar didukung dengan keberadaan SDM dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per Agustus 2025 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar didukung keberadaan 45 orang PNS dan 11 orang PPPK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pendidikan

No	Golongan Ruang	Jenis Kelamin (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	PNS			
1	S2 (Pasca Sarjana)	2	-	2
2	S1 (Sarjana)	5	8	13
3	Diploma III	2	1	3
4	Diploma II	-	-	0
5	Diploma I	-	-	0
6	SLTA	19	1	20
7	SLTP	4	-	4
8	SD	3	-	3
Jumlah PNS		35	10	45
	PPPK			
1	S2 (Pasca Sarjana)	-	-	0
2	S1 (Sarjana)	1	1	2
3	Diploma III	-	-	0
4	Diploma II	-	-	0
5	Diploma I	-	-	0
6	SLTA	5	3	8
7	SLTP	-	-	0
8	SD	1	-	1
Jumlah PPPK		7	4	11

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV / c	-	1	1
2	IV / b	-	-	0
3	IV / a	2	2	4
4	III / d	3	2	5
5	III / c	1	-	1
6	III / b	1	3	4
7	III / a	4	2	6
8	II / d	11	-	11

9	II / c	5	-	5
10	II / b	1	-	1
11	II / a	5	-	5
12	I / d	2	-	2
13	I / c	-	-	0
14	I / b	-	-	0
15	I / a	-	-	0
16	I	1	-	1
17	V	5	3	8
18	IX	1	1	2
TOTAL		42	14	56

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan

No	Golongan Ruang	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Struktural	3	4	7
2	Fungsional	3	4	7
3	Pelaksana	36	6	42
TOTAL		42	14	56

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah berdasarkan Kondisi

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
	1) Tanah terdiri dari : ✓ Taman Pecut ✓ Taman Kehati ✓ TPA ✓ Taman Rembang ✓ Taman Jaten ✓ Taman Sentul ✓ Kebonrojo ✓ Aloon – Aloon ✓ Kebun bibit Tanjungsari ✓ Taman eks Kelurahan Pakunden ✓ Taman eks Kelurahan Bendo ✓ Taman eks Kelurahan Rembang ✓ Taman Jembatan Merah ✓ Taman Jalan Sumatra ✓ Joko Pangon Eco Park	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	
	2) Bangunan gedung terdiri dari : ✓ Gedung Kantor DLH Kota Blitar ✓ Gedung Kantor TPA ✓ Gedung Gudang	Baik Baik Baik	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
	Garasi ✓ Gedung TPST 3R di Kelurahan Blitar	Baik	
	3) Alat transportasi terdiri dari : ✓ Kendaraan roda 3 viar : 14 unit ✓ Dump Truck : 5 unit ✓ Truck armroll : 11 unit ✓ Pick up : 2 unit ✓ Mobil operasional : 2 unit ✓ Mobil operasional pimpinan : 1 unit ✓ Sepeda motor : 11 unit ✓ Wheelloader : 1 unit ✓ Sky lift : 2 unit ✓ Excavator : 1 unit ✓ Bulldozer : 2 unit	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	
	4) Sarpras terdiri dari : ✓ Laptop : 16 unit ✓ PC : 7 unit ✓ AC : 9 unit ✓ CCTV : 12 unit	Baik Baik Baik Baik	

Berdasarkan tabel diatas, seluruh sarana dan prasarana yang terdaftar berada dalam kondisi baik. Namun, ada beberapa sarana prasarana pengelolaan sampah, seperti : kendaraan angkut sampah, alat berat, kontainer, bak sampah, gerobak, TPS, TPS 3R, TPA yang memerlukan pemeliharaan.

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar

Kinerja urusan lingkungan hidup Kota Blitar salah satunya dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai yang menunjukkan pencapaian kinerja di bidang lingkungan Hidup dengan melihatpada 3 (tiga) parameteryaitu:

- 1. Indeks kualitas air
- 2. Indeks kualitas udara
- 3. Indeks kualitas lahan

Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2022-2025 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2022-2025 sebagai berikut :

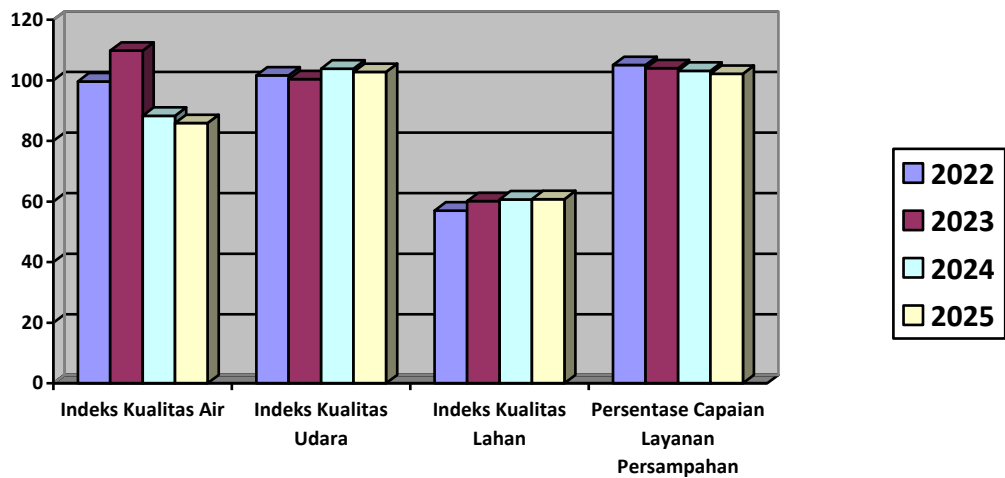
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKU Kota	68,86	70,03	71,2	72,37	64,15	67,58	64,94	64,95	93,16%	96,50%	91,21%	89,75%
	TUJUAN													
1	Indeks kualitas air	IKU	59,92	61,72	63,52	65,32	59,73	67,78	56,11	56,12	99,68%	109,82%	88,33%	85,92%
2	Indeks kualitas udara	IKU	84,53	85,48	86,43	87,38	85,9	85,83	89,79	89,80	101,62%	100,41%	103,89%	102,77%
3	Indeks kualitas lahan	IKU	55,23	55,73	56,23	56,73	31,5	33,51	34,13	34,50	57,03%	60,13%	60,70%	60,81%
4	Persentase capaian layanan persampahan	IKU	93	94	95	96	97,73	97,78	98,01	98,10	105,09%	104,02%	103,17%	102,19%
5	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3		67	72	72	75	60	73,81	75,01	75,50	89,55%	102,51%	104,18%	100,67%
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85 (A)	86 (A)	87 (A)	88 (A)	84,68 (A)	85,05 (A)	85,21 (A)	85,81 (A)	99,62%	98,90%	97,94%	97,51%
	SASARAN													
1	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu		-	82,5	85	85	-	91,67%	27,22%	30,00%	-	111,12%	32,02%	35,30%

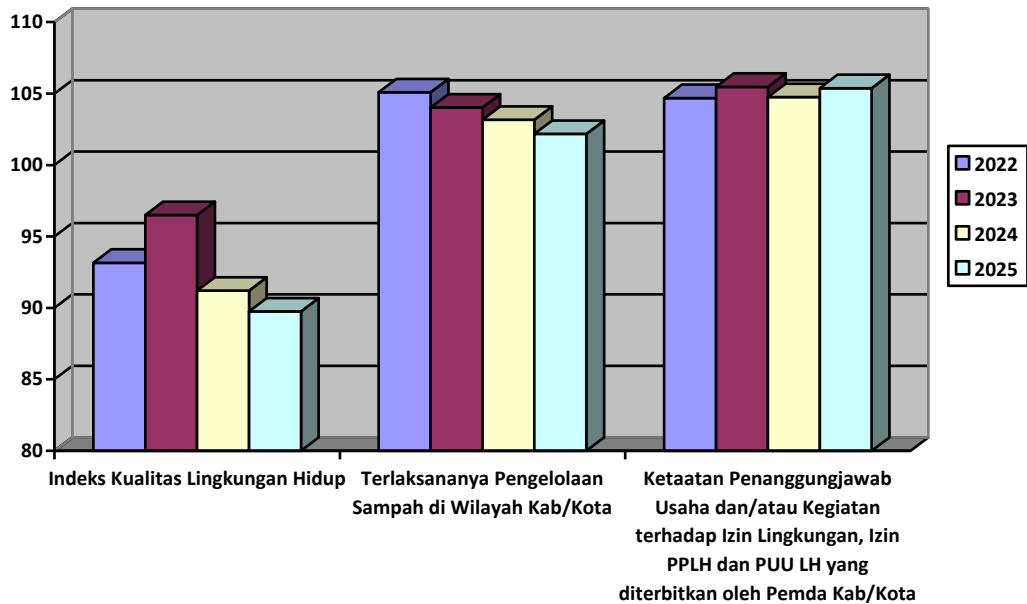
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)		-	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase RTH yang terkelola		-	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%
4	Persentase sampah terkelola		-	94,99	96	98	-	97,78%	98,01%	98,10%	-	102,94%	102,09%	100,10%
5	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik		-	72,5	75	75	-	73,81%	75,01%	75,50%	-	101,81%	100,01%	100,67%
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85 (A)	86 (A)	87 (A)	88 (A)	84,68 (A)	85,05 (A)	85,21 (A)	85,81 (A)	99,62%	98,90%	97,94%	97,51%
	IKK													
1	Indeks Kualitas	IKK	68,86	70,03	71,2	72,37	64,15	67,58	64,94	64,95	93,16%	96,50%	91,21%	89,75%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/ SPM/ IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota													
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	IKK	93	94	95	96	97,73	97,78	98,01	98,10	105,09%	104,02%	103,17%	102,18%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	IKK	64	64	65	65	67	67,5	68,09	68,50	104,69%	105,47%	104,75%	105,38%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui:
 Secara umum, realisasi kinerja dari sebagian besar indikator menunjukkan tren yang bervariasi selama periode 2022-2025.



Grafik 1. IKU DLH 2022-2025



Grafik 2. IKK DLH 2022-2025

- **Tren Positif:** Beberapa indikator menunjukkan peningkatan realisasi yang konsisten, yaitu :
 - Indeks Kualitas Udara (dari 85.9 pada 2022 menjadi 89.79 pada 2024)
 - Persentase capaian layanan persampahan (dari 97.73 pada 2022 menjadi 98.01 pada 2024), dan
 - Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 (dari 60 pada 2022 menjadi 75.01 pada 2024).
- **Tren Fluktuatif:** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan penurunan signifikan pada 2024 (64.94) setelah sempat naik pada 2023 (67.58). Hal serupa terjadi pada Indeks Kualitas Air, yang mengalami penurunan tajam pada 2024 (56.11) setelah peningkatannya di 2023 (67.78). Penurunan Indeks Kualitas Air pada tahun 2024 diakibatkan karena adanya limbah industri tahu, limbah domestik, dan limbah dari peternakan berperan besar mempengaruhi kualitas badan air.

- **Tren Menurun:** Indeks Kualitas Lahan menunjukkan tren realisasi yang rendah dan cenderung stagnan di angka 30-an (31.5 pada 2022, 33.51 pada 2023, 34.13 pada 2024) , jauh di bawah target yang ditetapkan. Penurunan nilai Indeks Tutupan Lahan dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan IKL dengan metode deleniasi tutupan lahan. Selain itu, penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas ruang terbuka hijau (RTH) namun pada deleniasi pohon yang bersifat keras. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan.

Beberapa indikator menunjukkan keberhasilan dalam mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, yaitu :

- **Indeks Kualitas Udara:** Tingkat capaiannya selalu di atas 100% selama 2022-2024, mencapai puncaknya pada 103.89% di 2024.
- **Persentase capaian layanan persampahan:** Capaiannya konsisten di atas 100%, dari 105.09% di 2022 hingga 103.17% di 2024.
- **Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3:** Pada tahun 2023 dan 2024, capaiannya melampaui target, mencapai 102.51% dan 104.18%.
- **Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi):** Indikator ini mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024, sesuai target.

Faktor keberhasilan pelayanan ini dapat dikaitkan dengan:

- **Peningkatan Kesadaran dan Regulasi:** Ketaatan pelaku usaha terhadap limbah B3 meningkat, kemungkinan karena adanya pengawasan dan penegakan regulasi yang lebih ketat.
- **Infrastruktur dan Pengelolaan yang Efektif:** Capaian tinggi pada pengelolaan sampah bisa menunjukkan adanya sistem pengelolaan yang baik dan efisien.
- **Kondisi Lingkungan yang Stabil:** Kualitas udara yang tetap baik, atau bahkan meningkat, bisa dipengaruhi oleh kebijakan transportasi dan industri yang efektif.

Terdapat beberapa indikator dengan kesenjangan capaian yang signifikan, menunjukkan perlunya perbaikan:

- **Indeks Kualitas Lahan:** Realisasi capaiannya sangat rendah, berkisar antara 57.03% hingga 60.70% dari target. Realisasi aktualnya (34.13 pada 2024) jauh di bawah target (56.23 pada 2024). Penurunan nilai Indeks Tutupan Lahan dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan IKL dengan metode deleniasi tutupan lahan. Selain itu, penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas ruang terbuka hijau (RTH) namun pada deleniasi pohon yang bersifat keras. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan.
- **Indeks Kualitas Air:** Setelah berhasil melampaui target pada 2023, tingkat capaiannya anjlok menjadi 88.33% di tahun 2024. Penurunan Indeks Kualitas Air pada tahun 2024 diakibatkan karena adanya limbah industri tahu, limbah domestik, dan limbah dari peternakan berperan besar mempengaruhi kualitas badan air.
- **Persentase badan air yang memenuhi baku mutu:** Capaian indikator ini mengalami penurunan drastis dari 111.12% di 2023 menjadi hanya 32.02% di 2024. Kesenjangan ini juga dikarenakan adanya limbah industri tahu, limbah domestik, dan

limbah dari peternakan berperan besar mempengaruhi kualitas badan air.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

- Masyarakat membutuhkan pelayanan pengelolaan sampah.
- Pelaku usaha / industri memerlukan pengawasan, izin lingkungan, atau bimbingan teknis untuk pengelolaan limbah sesuai regulasi.
- Komunitas dan Organisasi Lingkungan (Bank sampah, Pemilah dan pengirit sampah) memerlukan pembinaan terkait pengelolaan sampah.
- Sekolah yang menjadi target edukasi lingkungan, seperti program Adiwiyata untuk pengelolaan sampah dan penghijauan di lingkungan sekolah.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

- Pemerintah Daerah dan Instansi seperti PUPR Berkolaborasi dalam perencanaan tata ruang untuk penyediaan RTH dan infrastruktur lingkungan, Kelurahan yang Mendukung program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti kelurahan berseri atau bank sampah, bappeda mengintegrasikan isu lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan RTH.
- Pelaku usaha / industri Bekerja sama dalam pengelolaan limbah industri melalui kepatuhan terhadap regulasi AMDAL, UKL-UPL, atau teknologi pengolahan limbah
- Komunitas dan Organisasi Lingkungan (Bank sampah, Pemilah dan pengirit sampah) Mitra dalam pemilahan, daur ulang, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas untuk mengurangi beban TPA
- Sekolah merupakan mitra dalam program edukasi lingkungan, seperti Program Sekolah Adiwiyata, yang mendorong pengelolaan sampah dan penghijauan di lingkungan pendidikan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

- Potensi pengelolaan sampah melalui fasilitas seperti TPA, TPS 3R, bank sampah, dan rumah kompos. kemampuan mengubah sampah menjadi sumber daya ekonomi seperti energi atau pupuk
- Potensi pengembangan RTH di sempadan sungai, taman kota, dan lahan terbuka untuk meningkatkan kualitas udara dan ketahanan iklim.
- Potensi sumber daya alam seperti hutan dan sungai untuk restorasi lingkungan, kemampuan pengelolaan limbah industri melalui regulasi lokal.

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

- Pola pengelolaan sampah tradisional (kumpul-buang-angkut) yang tidak efisien, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah, overload pada TPA akibat volume sampah yang tinggi.
- Kurangnya proporsi RTH minimal 30% di kawasan perkotaan, konversi lahan hijau menjadi pemukiman atau infrastruktur akibat urbanisasi cepat..
- Pencemaran sungai, udara, dan tanah akibat limbah industri, kendaraan, dan sampah, deforestasi dan abrasi pantai.

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Minimalisasi Degradasi Lingkungan meliputi infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal dan Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

- Global : Krisis sampah plastik global yang berkontribusi pada polusi dan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati akibat sampah laut, Urban heat islands dan perubahan iklim yang memperburuk kondisi lingkungan kota global, Triple krisis planet: perubahan iklim, polusi, dan hilangnya Keanekaragaman hayati.
- Nasional : Target nasional penyelesaian 50% masalah sampah pada 2025; timbulan sampah nasional mencapai 64 juta ton/tahun dengan 11,3 juta ton tidak terkelola, Kewajiban nasional minimal 20% RTH publik dan 10% privat; penurunan RTH di kota-kota besar seperti, Pencemaran air di sungai-sungai utama; status lingkungan hidup menunjukkan pencemaran di berbagai ekoregion.
- Regional : Masalah lokal seperti kapasitas TPA yang mendekati fase puncak / penuh; inefisiensi pengelolaan sampah di kota, Kekurangan RTH menyebabkan peningkatan suhu dan polusi lokal, Pencemaran lokal di kelurahan akibat aktivitas manusia dan industri regional.

2.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

- Pengelolaan sampah belum optimal
- Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
- Pencemaran Lingkungan

Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Potensi pengelolaan sampah melalui fasilitas seperti TPA, TPS 3R, bank sampah, dan rumah kompos. kemampuan mengubah sampah menjadi sumber daya ekonomi seperti energi atau pupuk	Pola pengelolaan sampah tradisional (kumpul-buang-angkut) yang tidak efisien, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah, overload pada TPA akibat volume sampah yang tinggi.	Minimalisasi Degradasi Lingkungan meliputi infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal dan Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan	Krisis sampah plastik global yang berkontribusi pada polusi dan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati akibat sampah laut	Target nasional penyelesaian 50% masalah sampah pada 2025; timbulan sampah nasional mencapai 64 juta ton/tahun dengan 11,3 juta ton tidak terkelola.	Masalah lokal seperti kapasitas TPA yang mendekati fase puncak / penuh; inefisiensi pengelolaan sampah di kota.	Pengelolaan sampah belum optimal
Potensi pengembangan RTH di sempadan sungai, taman kota, dan lahan terbuka untuk meningkatkan kualitas udara dan ketahanan iklim.	Kurangnya proporsi RTH minimal 30% di kawasan perkotaan, konversi lahan hijau menjadi pemukiman atau infrastruktur akibat urbanisasi cepat.		Urban heat islands dan perubahan iklim yang memperburuk kondisi lingkungan kota global	Kewajiban nasional minimal 20% RTH publik dan 10% privat; penurunan RTH di kota-kota besar seperti	Kekurangan RTH menyebabkan peningkatan suhu dan polusi lokal.	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
Potensi sumber daya alam seperti hutan dan sungai untuk restorasi lingkungan, kemampuan pengelolaan limbah industri melalui regulasi lokal.	Pencemaran sungai, udara, dan tanah akibat limbah industri, kendaraan, dan sampah, deforestasi dan abrasi pantai.		Triple krisis planet: perubahan iklim, polusi, dan hilangnya Keanekaragaman hayati	Pencemaran air di sungai-sungai utama; status lingkungan hidup menunjukkan pencemaran di berbagai ekoregion.	Pencemaran lokal di kelurahan akibat aktivitas manusia dan industri regional.	Pencemaran Lingkungan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar periode 2025-2029 memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan nasional. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitarberlandaskan pada dua pilar utama: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Penentuan target sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	akhir periode Renstra	
	Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup Sasaran RPJMD: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan (untuk level wilayah Kabupaten/Kota).	IKLH Kabupaten/Kota = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	64,94	Indeks	67,0 ₂	67,0 ₉	67,1 ₇	67,2 ₅	67,3 ₃	67,4 ₁	67,41	
			Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IKA = \sum_{i=1}^n W_i I_i$ Keterangan: W_i = Bobot parameter i I_i = Nilai dari parameter i	56,11	Indeks	69,4 ₇	69,5 ₇	69,6 ₇	69,7 ₇	69,8 ₇	69,9 ₇	69,97	IKU
			Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0.99} (I_{PM_{2.5}} - 0.01) \right)$ $I_{PM_{2.5}} = \frac{Rata - rata (Indeks NO_2 + Indeks SO_2 + Indeks PM_{2.5})}{3}$ $Indeks NO_2 = \frac{Rata - rata NO_2}{Baku Mutu IKA}$ $Indeks SO_2 = \frac{Rata - rata SO_2}{Baku Mutu IKA}$ $Indeks PM_{2.5} = \frac{Rata - rata PM_{2.5}}{Baku Mutu IKA}$	89,79	Indeks	79,5 ₉	79,6 ₉	79,7 ₉	79,8 ₉	79,9 ₉	80	80	IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baselin e 2024	Satua n	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	akhir periode Renstra	
					waktu tertentu.											
			Meningkatny a Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut.	IKL = IKTL + Faktor koreksi gambut	34,13	Indeks	39,5 5	39,5 5	39,5 6	39,5 6	39,5 6	39,5 6	39,56	IK U
			Meningkatny a Kinerja Pengelolaan Persampahan yang Berkelanjuta n	Indeks Kinerja Pengelolaa n Sampah (IKPS)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan sampah di suatu wilayah Kota	Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (kalkulator)	61,7	poin	61,7	61,7	61,7	62	62	62	62	IK U
			Meningkatny a Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang = NRR per unsur x (0,111) NRR per unsur = Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden NRR = Nilai rata-rata	85,36	Indeks	80	85	85,5	86	86,5	87	87	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2025–2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi memuat rencana komprehensif perangkat daerah dalam menghadapi isu strategis perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang didalamnya memuat penahapan Renstra yang disinronkan dengan penahapan RPJMD Tahun 2025-2029, kegiatan prioritas dan lokusnya. Arah kebijakan memuat rangkaian kerja yang selaras dengan strategi yang menjadi operasionalisasi NSPK, dicascadingkan dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait Pengelolaan sampah belum optimal perlu dilaksanakan pengurangan sampah yang masuk di TPA Ngegong dikarenakan kondisi TPA Ngegong yang hampir penuh. Arah kebijakan utama meliputi :

- Pengadaan Incenerator sampah
- Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Cell TPA Baru
- Pembentukan Kampung Zero Waste dalam pengelolaan sampah
- Pembentukan Bank sampah Induk dan Optimalisasi TPS 3 R

Serta Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Arah kebijakan pembangunan taman difokuskan pada pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Mengintegrasikan target RTH minimal 30% (20% publik, 10% privat) dalam RTRW, mengembangkan taman kota, hutan kota, dan koridor hijau, melibatkan pengembang properti untuk menyediakan RTH dalam proyek perumahan; serta mendorong komunitas untuk penghijauan melalui program seperti Adiwiyata atau Kelurahan Berseri. Sedangkan terkait Pencemaran Lingkungan dengan melaksanakan Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah secara berkala; menerapkan regulasi izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) dan melaksanakan pembinaan secara rutin terhadap kelompok masyarakat ataupun pelaku usaha/ kegiatan.

Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemanfaatan teknologi	Pengelolaan sampah belum optimal	Mendorong pembentukan bank sampah induk, Optimalisasi TPS 3R, Pengadaan Incenerator sampah, Lahan untuk Pembangunan Cell TPA Baru, Pembentukan Kampung Zero Waste.
Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pencemaran Lingkungan	Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah secara berkala; menerapkan regulasi izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) dan melaksanakan pembinaan secara rutin terhadap kelompok masyarakat ataupun pelaku usaha/ kegiatan
	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	Mengintegrasikan target RTH minimal 30% (20% publik, 10% privat) dalam RTRW; mengembangkan taman kota, hutan kota, dan koridor hijau; melibatkan pengembang properti untuk menyediakan RTH dalam proyek perumahan; serta mendorong komunitas untuk penghijauan melalui program seperti Adiwiyata atau Kelurahan Berseri

Dalam mencapai strategi tersebut, maka dirumuskan penahapan Renstra DLH Tahun 2025-2029 dengan mengacu penahapan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Menyusun dan mensosialisasikan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota tentang Perencanaan teknis dan Manajemen Persampahan/ Masterplan	1. Meluncurkan program percontohan (pilot project) bank sampah Induk di 2-3 kelurahan/desa. 2. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengelolaan sampah (TPS	1. Implementasi sistem insentif (reward) bagi komunitas (bank sampah, Kelompok peduli lingkungan) terbaik dalam pengelolaan sampah. 2. Penerapan sanksi	1. Optimalisasi sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. 2. Penguatan kapasitas UMKM dan industri dalam menerapkan produksi	1. Evaluasi menyeluruh terhadap capaian seluruh tahapan dan dampaknya terhadap cakupan pengelolaan sampah dan penurunan tingkat pencemaran.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Persampahan. 2. Pembangunan Taman Outbound Gedog. 3. Pengadaan Lahan TPA dan Pengadaan Incenerator sampah. 4. Pelatihan kader lingkungan dan tenaga teknis pengelola sampah. 5. Melaksanakan uji kualitas lingkungan lingkungan (Air dan Udara)	3R, armada angkut). 3. Pemberian bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah (tong sampah terpilah, komposter) kepada kelompok masyarakat. 4. Penerapan sistem pemantauan kualitas air/udara di lokasi industri. 5. Pelatihan kader lingkungan dan tenaga teknis pengelola sampah.	administratif (denda) pertama kali kepada pelaku pencemar ringan. 3. Integrasi sistem pengaduan masyarakat online untuk pelaporan pencemaran. 4. Memulai kerjasama dengan swasta untuk pemanfaatan teknologi daur ulang (waste to energy/composting).	bersih (cleaner production). 3. Audit lingkungan secara berkala terhadap industri berisiko tinggi. 4. Pemanfaatan data dari sistem pemantauan untuk perbaikan kebijakan secara real-time. 5. Pengembangan pasar hasil daur ulang sampah (off-taker).	2. Penyusunan kebijakan dan strategi lanjutan untuk 5 tahun ke depan berdasarkan evaluasi.

Arah kebijakan memuat rangkaian kerja yang selaras dengan strategi yang menjadi operasionalisasi NSPK, dicascadingkan dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan telaah operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD maka dirumuskan arah kebijakan Renstra DLH sebagai berikut:

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Persampahan	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular ekonomi dan peningkatan pengelolaan dan layanan sampah B3	• Penyediaan dan pemeliharaan sarpras persampahan • Pelayanan pembersihan sampah • Pembinaan pelaku Pengelolaan Sampah (Bank sampah, Pemilah dan pengirit sampah) • Penanganan dan pengolahan sampah • Penyusunan kebijakan pengelolaan sampah • pembinaan dan pemantauan bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 • Penyediaan data pengelolaan limbah B3 • Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	
2	Perencanaan Lingkungan Hidup			
3	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)			
4	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			
5	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin			

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		• Pelaksanaan Monev Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup • Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/ usaha kegiatan • Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah • Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku • Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan • Pelaporan pelaku usaha dan/ usaha kegiatan • Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup • Penilaian Kinerja Lingkungan Hidup • Peningkatan kompetensi bagi SDM Lingkungan Hidup • Pembinaan kelompok peduli lingkungan	
6	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			
7	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			
8	Pengaduan Lingkungan Hidup			
9	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	• Pembinaan pengelolaan air limbah bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan • Pelaksanaan uji kualitas air badan air • Penyediaan Data dan Informasi kualitas Air • Penyusunan Kebijakan Dokumen Pencegahan dan penanggulangan Pencemaran • Pelaksanaan penghentian pencemaran air • Pelaksanaan Pembersihan Pencemaran • Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim • Pelaksanaan uji kualitas udara • Penyediaan dokumen hasil inventarisasi GRK dan Profil GRK • Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim	
10	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum dan	• Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota • Penyediaan Sarpras Taman Kota • Penyediaan Dokumen Rencana Induk RTH	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
		infrastruktur kota yang peduli lingkungan	Pelaksanaan Sosialisasi Penghijauan	

Kompilasi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan DLH Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi		: Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan		
Misi		: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance;		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air	Menurunnya Pencemaran Air	- Pembinaan pengelolaan air limbah bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan - Pelaksanaan uji kualitas air badan air - Penyediaan Data dan Informasi kualitas Air - Penyusunan Kebijakan Dokumen Pencegahan dan penanggulangan Pencemaran - Pelaksanaan penghentian pencemaran air - Pelaksanaan Pembersihan Pencemaran	
	Meningkatnya Kualitas Udara	Menurunnya Pencemaran udara	- Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim - Pelaksanaan uji kualitas udara - Penyediaan dokumen hasil inventarisasi GRK dan Profil GRK - Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim	
	Meningkatnya Kualitas Tutupan	Meningkatkan Ketersediaan Ruang	Pemeliharaan dan Penataan	

Visi	: Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan		
Misi	: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance;		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Lahan	terbuka hijau	Taman Kota • Penyediaan Sarpras Taman Kota • Penyediaan Dokumen Rencana Induk RTH • Pelaksanaan Sosialisasi Penghijauan
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Persampahan dan Penanganan Limbah B3	• Penyediaan dan pemeliharaan sarpras persampahan • Pelayanan pembersihan sampah • Pembinaan pelaku Pengelolaan Sampah (Bank sampah, Pemilah dan pengirit sampah) • Penanganan dan pengolahan sampah • Penyusunan kebijakan pengelolaan sampah • pembinaan dan pemantauan bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 • Penyediaan data pengelolaan limbah B3
		Meningkatnya Kepatuhan terhadap Regulasi Lingkungan Hidup	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup • Pelaksanaan Monev Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup • Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/ usaha kegiatan • Pelaporan pelaku usaha dan/ usaha kegiatan

Visi	: Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan		
Misi	: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance;		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			• Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	• Penilaian Kinerja Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup	• Peningkatan kompetensi bagi SDM Lingkungan Hidup • Pembinaan kelompok peduli lingkungan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	• Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah • Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku • Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah hasil cascading tujuan, sasaran, outcome dan output sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 memuat daftar program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Dalam sub bab ini juga memuat daftar subkegiatan prioritas perangkat daerah yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Sasaran Renstra: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Air			Indeks Kualitas Air (Indeks)		
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Persentase badan air yang memenuhi baku mutu (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatnya Baku Mutu Badan Air	Persentase badan air yang dipantau baku mutu secara berkala	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
				Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan	2.11.03.2.01.0017 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	kewenangannya (Dokumen)	Hidup sesuai dengan kewenangannya	
				Meningkatnya Pemulihan Sumber Pencemar ditanggulangi	Persentase Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (%)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya Kualitas Udara			Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatnya baku mutu badan udara	Persentase kawasan yang dipantau baku mutu udaranya secara berkala	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
				Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.2.01.0008 - Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	
				Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase RTH	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Meningkatnya Kualitas RTH Publik	Luas RTH Publik yang Terkelola	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
				Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
				Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
				Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan yang Berkelanjutan			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
				RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.01.0007 - Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Meningkatnya Cakupan Layanan limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 (Dokumen)	2.11.05.2.02.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulanLimbah B3	
				Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	2.11.05.2.02.0007 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
				Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi		Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Meningkatnya Cakupan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh		
				Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa /kasus tindak pidana lingkungan hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan pengaduan permasalahan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya tata kelola persampahan		Persentase cakupan layanan persampahan	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase sampah tertangani Persentase sampah berkurang	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
				Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
				Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
				Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
				Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
				Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi SDM bidang lingkungan hidup		Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
					Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terkait Lingkungan Hidup	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.11.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	2.11.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Daerah (Berita Acara)	Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.11.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2.11.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.11.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Daerah			
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.11.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				SKPD			
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya	Jumlah Peralatan dan Mesin	2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lainnya yang Dipelihara(Unit)	Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
2.11 - URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																		
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan Sesuai Standar/Kete ntuan yang Berlaku adalah ukuran tingkat kepatuhan suatu unit kerja atau instansi dalam menyediakan dukungan dan sarana prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas kedinasan,	(Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku dibagi jumlah fasilitasi layanan kedinasan) x 100 %	100	%	10 0	6.632. 720.99 1,00	100	6.664. 561.85 7,00	100	6.032. 713.82 2,00	100	6.032. 713.82 2,00	100	6.032. 713.82 2,00	100	31.395. 424.31 4,00	

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Perangkat Daerah																		
Terlaksananya a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/s emesteran/ta hunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	0	lapo ran	7	500.00 0,00	7	500.00 0,00	7	500.00 0,00	7	500.00 0,00	7	500.00 0,00	35	2.500.0 00,00	
2.11.01.2.01. 0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
Terlaksananya a Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasik an oleh	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	0	data	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	5	2.500.0 00,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		Perangkat Daerah yang menangani statistik																
2.11.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
Terlaksananya a Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pembahasan rancangan Renstra dan rancangan Renja	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	0	Beri ta Acar a	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	5	12.500.000,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait																
2.11.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	0	dokumen	11	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	59	2.500.000,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		anggaran, dokumen pengarusuta maam gender, profil perangkat daerah																
2.11.01.2.01. 0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melaluiKoordi nasi Teknis Pembangunan																		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melaluiKoordi nasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melaluiKoordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembanguna n Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembanguna n merupakan kegiatan sinkronisasi dan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melaluiKoordinasi Teknis Pembangunan tahun berjalan	0	Beri ta Acar a	1	2.500. 000,00	1	2.500. 000,00	1	2.500. 000,00	1	2.500. 000,00	1	2.500. 000,00	5	12.500. 000,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan		oran		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.500.0 00,00	
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat pelayanan penatausaha an barang	Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenisadministrasi Barang Milik Daerahyang harus disediakan	0	Pers en	10 0	500.00 0,00	100	500.00 0,00	100	500.00 0,00	100	500.00 0,00	100	500.00 0,00	100	2.500.0 00,00	
2.11.01.2.03. 0006 - Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD																		
Terlaksananya Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausaha an barang milik daerah memuat Penyusunan RKPBMD, Pengamanan, Penilaian,	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	0	Lap oran	2	500.00 0,00	2	500.00 0,00	2	500.00 0,00	2	500.00 0,00	2	500.00 0,00	10	2.500.0 00,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian BMD																
2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																		
Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah memuat laporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah jenisadministrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah yang harus disediakan	0	Pers en	10 0	500.00 0,00	100	500.00 0,00	100	500.00 0,00	100	500.00 0,00	100	500.00 0,00	100	2.500.0 00,00	
2.11.01.2.04. 0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan retribusi daerah memuat penyusunan pendataan, pemungutan,	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun n	0	Lap oran	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	5	2.500.0 00,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
beserta Atribut Kelengkapann ya																		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kost um untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	3	Pak et	0	-	3	50.000 .000,0 0	3	50.000 .000,0 0	3	55.000 .000,0 0	3	55.000 .000,0 0	12	210.00 0.000,0 0	
2.11.01.2.05. 0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan																		
Terlaksananya a Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	69	Ora ng	69	41.776 .600,0 0	69	41.776 .600,0 0	70	41.776 .600,0 0	70	41.776 .600,0 0	70	41.776 .600,0 0	348	208.88 3.000,0 0	
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
Meningkatnya Administrasi	Persentase ketersediaan	Ketersediaan administrasi	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	100	Pers en	10 0	192.76 2.426,	100	202.99 4.300,	100	192.99 4.300,	100	192.99 4.300,	100	202.99 4.300,	100	984.73 9.626,0	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Kantor																		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	Pak et	1	2.496. 400,00	1	2.496. 400,00	1	2.496. 400,00	1	2.496. 400,00	1	2.496. 400,00	5	12.482. 000,00	
2.11.01.2.06. 0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JumlahPaketPeral atandanPerlengka pan Kantor yang Disediakan	Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang	JumlahPaketPeralatandanPerlen gkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	5	Pak et	5	28.789 .600,0 0	5	28.789 .600,0 0	5	28.789 .600,0 0	5	28.789 .600,0 0	5	28.789 .600,0 0	25	143.94 8.000,0 0	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	Pak et	2	8.000. 200,00	2	8.000. 200,00	2	8.000. 200,00	2	8.000. 200,00	2	8.000. 200,00	10	40.001. 000,00	
2.11.01.2.06. 0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan																		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah BahanBacaandan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	36	Dok ume n	36	4.710. 000,00	36	4.710. 000,00	36	4.710. 000,00	36	4.710. 000,00	36	4.710. 000,00	180	23.550. 000,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran																
2.11.01.2.06. 0009 - Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
Terlaksananya a Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	60	Lap oran	50	85.718 .126,0 0	52	86.000 .000,0 0	54	86.000 .000,0 0	56	86.000 .000,0 0	58	86.000 .000,0 0	270	429.71 8.126,0 0	
2.11.01.2.06. 0010 - Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD																		
Terlaksananya a Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif,	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	0	Dok ume n	0	-	0	10.000 .000,0 0	0	-	0	-	1	10.000 .000,0 0	1	20.000. 000,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah																
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak	JumlahBMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	Pers en	-	-	100	30.000 .000,0 0	100	20.000 .000,0 0	100	120.00 0.000, 00	100	20.000 .000,0 0	100	190.00 0.000,0 0	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		<i>berwujud, pembanguna n gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD</i>																
2.11.01.2.07. 0005 - Pengadaan Mebel																		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	0	Pak et	0	-	1	10.000 .000,0 0	0	-	0	-	0	-	1	10.000. 000,00	
2.11.01.2.07. 0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	0	Unit	0	-	5	20.000 .000,0 0	5	20.000 .000,0 0	5	20.000 .000,0 0	5	20.000 .000,0 0	20	80.000. 000,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD																
2.11.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Aset Tetap Lainnya yang Disediakan mencakup hewan, tumbuhan, alat kesenian, koleksi perpustakaan yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	0	Unit	0	-	0	-	0	-	1	100.00 0.000,00	0	-	1	100.00 0.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	37	Unit	39	80.505 .100,0 0	39	80.505 .100,0 0	39	80.505 .100,0 0	39	80.505 .100,0 0	39	80.505 .100,0 0	195	402.52 5.500,0 0	
2.11.01.2.09. 0005 - Pemeliharaan Mebel																		
Terlaksananya a Pemeliharaan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	0	Unit	0	-	0	-	1	5.000. 000,00	0	-	1	5.000. 000,00	2	#VALU E!	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Mebel		aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD																
2.11.01.2.09. 0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
Terlaksananya a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	80	Unit	70	33.807 .500,0 0	72	33.807 .500,0 0	74	33.807 .500,0 0	75	33.807 .500,0 0	75	33.807 .500,0 0	366	169.03 7.500,0 0	
2.11.01.2.09. 0009 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi sesuai RKPBMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	0	Unit	0	-	1	50.000 .000,0 0	0	-	1	25.000 .000,0 0	0	-	2	75.000. 000,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase ini merupakan rasio antara jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti secara memadai terhadap total rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti dalam periode pelaporan tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persen	Jjumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/jumlah total rekomendasi) x 100%	50	Persentase	55	5.500.000,00	58	5.526.403,00	60	5.500.000,00	62	5.500.000,00	65	5.500.000,00	65	27.526.403,00	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota																		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun adalah total keseluruhan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun dalam satu tahun	2	Dokumen	1	5.500.000,00	2	5.000.000,00	2	5.500.000,00	2	3.500.000,00	1	4.500.000,00	8	24.000.000,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/K ota yang telah ditetapkan																		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi RPPLH Kabupaten/K ota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen RPPLH Kabupaten/K ota yang telah ditetapkan merujuk pada dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang telah disusun, disahkan secara resmi oleh pemerintah Kota Blitar (misalnya melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Wali Kota Blitar), dan berisi strategi, kebijakan, serta rencana aksi untuk perlindungan	Dokumen RPPLH yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi pada tahun berjalan	Dokumen		-	-	-	-	1	2.500.000,00	-	-	-	-	1	2.500.000,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Blitar																
2.11.02.2.02 - Penyelenggara an Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Ko ta																		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang disusun	Jumlah dokumen KLHS yang telah diselesaikan untuk mendukung penyusunan Rencana Pembanguna n Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan/ atau Rencana Pembanguna n Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat kabupaten/ k ota dalam periode waktu tertentu	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota Kota Blitar ng disusun pada tahun berjalan		Dok ume n	-	-	1	526.40 3,00	-	-	2	2.000. 000,00	1	1.000. 000,00	4	3.526.4 03,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		(misalnya, satu tahun anggaran)																
2.11.02.2.02. 0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM D																		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJM D Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Definisi Operasional: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJM D Kota Blitar yang Disusun Definisi Operasional: Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembanguna n Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau Rencana Pembanguna n Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar yang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang Disusun pada tahun berjalan	0	Dok ume n	-	-	-	-	-	-	1	1.000. 000,00	1	1.000. 000,00	2	2.000.0 00,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		disusun merujuk pada banyaknya dokumen KLHS yang telah diselesaikan dan disusun secara resmi oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah																
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS																		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi pada tahun berjalan	0	Dokumen	-	-	1	526.403,00	-	-	1	1.000.000,00	-	-	2	1.526.403,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
N DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																		
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	Badan air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati. Perhitungan Status Mutu air menggunaka n metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggar aan Perlindungan	(Jumlah badan air yang memenuhi baku mutu / jumlah badan air yang ditetapkan) x 100%	-	%	66, 7	228.59 9.900, 00	77, 8	229.69 7.311, 00	77, 8	208.54 9.900, 00	77, 8	208.54 9.900, 00	77, 8	208.54 9.900, 00	77, 8	1.083.9 46.911, 00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan status mutu baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat																
	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara	Kawasan yang memenuhi baku mutu adalah wilayah yang kualitas udara ambiennya memenuhi baku mutu udara . Lokasi pemantauan kualitas udara ambien harus memenuhi kriteria : 1) daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat; 2) daerah atau kawasan industri; 3) pemukiman padat penduduk;	(Jumlah kawasan yang memenuhi baku mutu / Jumlah kawasan yang ditetapkan) x 100%	100	%	10 0		10 0		100		100		100		100	-	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		dan 4) kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi.																
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Ko ta																		
Meningkatnya baku mutu badan air	Persentase badan air yang dipantau baku mutunya secara berkala	Persentase ini merupakan rasio antara jumlah badan air yang telah dilakukan pengambilan sampel dan pengujian parameter baku mutu airnya sesuai dengan rencana pemantauan berkala, terhadap total badan air yang seharusnya dipantau dalam periode waktu yang sama, yang	(Badan air yang dipantau/ total badan air yang dijadwalkan) x 100 %	100	%	10 0	228.59 9.900, 00	100	229.19 7.311, 00	100	208.04 9.900, 00	100	208.04 9.900, 00	100	208.04 9.900, 00	100	1.081.9 46.911, 00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		dinyatakan dalam bentuk persen																
2.11.03.2.01. 0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut merujuk pada banyaknya dokumen atau laporan resmi yang berisi hasil pengujian kualitas lingkungan hidup untuk media tanah, air (termasuk	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut pada tahun berjalan	1	Dok ume n	1	157.60 0.000, 00	1	157.60 0.000, 00	1	127.60 0.000, 00	1	137.60 0.000, 00	1	137.60 0.000, 00	5	718.00 0.000,0 0	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		air permukaan, air tanah, atau air limbah), udara, dan laut, yang dilakukan oleh instansi berwenang atau laboratorium terakreditasi di wilayah kabupaten/kota																
2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut																		
Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut merujuk pada banyaknya	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun pada tahun berjalan	0	Lap oran	-	-	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	4	2.000.0 00,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangann ya																		
Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangann ya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangann ya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya pada tahun berjalan	0	Dok ume n	-	-	-	-	1	20.000 .000,0 0	-	-	-	-	1	20.000. 000,00	
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/K ota																		
Meningkatnya Baku Mutu Badan Udara	Persentase Kawasan yang dipantau baku mutu udaranya secara berkala	Persentase rasio antara jumlah kawasan (yang direpresentas ikan oleh titik-titik pantau) yang telah dilakukan	(Jumlah Kawasan/Titik Pantau yang Dipantau/ Total Kawasan/Titik Pantau yang Dijadwalkan untuk Dipantau) x 100%	100	%	10 0	70.999 .900	100	71.097 .311	100	59.949 .900	100	69.949 .900	100	69.949 .900	100	341.94 6.911	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		pengukuran parameter baku mutu udara ambiennya sesuai dengan rencana pemantauan berkala, terhadap total kawasan yang seharusnya dipantau dalam periode waktu yang sama, yang dinyatakan dalam bentuk persen																
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
Terlaksananya a Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan pada tahun berjalan	1	Dok ume n	1	70.999 .900,0 0	1	70.097 .311,0 0	1	58.949 .900,0 0	1	68.949 .900,0 0	1	68.949 .900,0 0	5	337.94 6.911,0 0	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
monitoring, evaluasi dan pelaporan																		
Terlaksananya a kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi,pembin aan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Meningkatny a jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi gas rumah kaca (GRK), mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim merujuk pada peningkatan frekuensi dan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh instansi berwenang (seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/K ota) atau pihak terkait untuk mendukung pengelolaan emisi GRK, pengurangan dampak	Jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tahun berjalan	0	Kegi atan	0	-	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	4	2.000.0 00,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Ko ta																		
Meningkatnya Pemulihan Sumber Pencemar ditanggulangi	Jumlah pencemaran/ kerus akan lingkungan hidup yang ditanggulangi	Total kasus pencemaran lingkungan (air, udara, tanah) atau kerusakan ekosistem yang telah diberikan tindakan penanggulang an untuk memulihkan, mengurangi dampak, atau mengendalika n sumbernya, melalui intervensi teknis, hukum, atau partisipatif	Jumlah pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi pada tahun berjalan	0	Titik	-	-	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	4	2.000.0 00,00	
2.11.03.2.02. 0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Total aktivitas, fasilitas, atau praktik yang sebelumnya menyebabkan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan pada tahun berjalan	0	Titik	0	-	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	1	500.00 0,00	4	2.000.0 00,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Dihentikan		pencemaran lingkungan (air, udara, tanah)																
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAA N KEANEKARA GAMAN HAYATI (KEHATI)																		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaraga man hayati	Persentase RTH	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH Publik) adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Kota Blitar melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.	Persentase RTH = Jumlah Luas RTH/ Luas Wilayah Kota Blitar	16.2 6	Pers en	16. 26	7.270. 631.30 0	16. 26	7.305. 534.50 2	16. 26	1.200. 631.30 0	16. 26	1.200. 631.30 0	16. 26	1.200. 631.30 0	16. 26	18.178. 059.70 2,00	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaraga man Hayati Kabupaten/ Ko ta																		
Meningkatnya	Luas RTH Publik	Total luas	Luas RTH Publik yang Terkelola	420,	Ha	42	7.270.	420	7.305.	420	1.200.	420	1.200.	420	1.200.	420	18.178.	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Kualitas RTH Publik	yang Terkelola	area Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berstatus publik (milik pemerintah atau akses terbuka untuk masyarakat) dan secara aktif dikelola untuk memenuhi fungsi ekologis, sosial, dan estetika, dalam suatu wilayah tertentu (kota, kabupaten, atau kawasan)	pada tahun berjalan	36		0,36	631.300,00	,36	534.502,00	,36	631.300,00	,36	631.300,00	,36	631.300,00	,36	059.702,00	
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Total dokumen perencanaan strategis yang secara resmi disusun dan mengikat sebagai pedoman	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun pada tahun berjalan	0	Dokumen		-	1	50.000.000,00		-		-		-	1	50.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		pengelolaan keanekaragaman hayati dalam suatu wilayah																
2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Total individu yang mengalami peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi dalam aspek pengelolaan keanekaragaman hayati (konservasi, restorasi, pemanfaatan berkelanjutan , atau monitoring) melalui intervensi tertentu (pelatihan, pendidikan, pendampingan, atau praktik	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada tahun berjalan	0	Orang	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	0	-	1	10.000.000,00	3	30.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		langsung)																
2.11.04.2.01. 0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaraga man Hayati																		
Sarana dan Prasarana Keanekaraga m Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Total fasilitas (sarana) dan infrastruktur pendukung (prasarana) yang secara aktif dikelola untuk tujuan konservasi, penelitian, edukasi, atau pemanfaatan berkelanjutan keanekaraga man hayati dalam suatu wilayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola pada tahun berjalan	14	Unit	18	7.270. 631.30 0,00	18	7.245. 534.50 2,00	19	1.190. 631.30 0,00	20	1.200. 631.30 0,00	20	1.190. 631.30 0,00	20	18.098. 059.70 2,00	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALI AN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																		
Meningkatnya penanganan	Persentase Limbah B3 yang	Persentase Limbah B3	(Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai standar) /	75.0 1	Pers en	76. 47	2.970. 000,00	76. 47	2.984. 257,00	77. 94	2.970. 000,00	77. 94	2.970. 000,00	79. 41	2.970. 000,00	79. 41	14.864. 257,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Terkelola	yang Terkelola adalah ukuran kuantitatif dari proporsi limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dihasilkan oleh suatu entitas (misalnya, fasilitas, organisasi, atau wilayah) yang telah ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar lingkungan yang berlaku.	(Jumlah limbah B3 yang dihasilkan) x 100%															
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																		
Meningkatnya Cakupan Layanan limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	Jumlah pelaku usaha yang memenuhi seluruh persyaratan	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup pada tahun berjalan	45	Usa ha dan /ata u Kegi	48	2.970. 000,00	48	2.984. 257,00	50	2.970. 000,00	50	2.970. 000,00	53	2.970. 000,00	53	14.864. 257,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		pengelolaan limbah B3 berdasarkan verifikasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait limbah B3			atan													
2.11.05.2.02.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3																		
Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Jumlah permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang telah difasilitasi penyelesaiannya melalui mekanisme terintegrasi antara	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 pada tahun berjalan	0	Dokumen	0	-	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	4	4.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
pengumpulan Limbah B3		persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, dan perizinan berusaha dalam sistem perizinan tunggal (OSS)																
2.11.05.2.02. 0007 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3																		
Terlaksananya a pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	Jumlah kegiatan pembinaan teknis dan pemantauan lapangan yang dilaksanakan oleh instansi berwenang (Dinas Lingkungan Hidup) terhadap pelaku usaha penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah limbah B3 untuk memastikan kepatuhan	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan pada tahun berjalan	2	Usa ha	2	2.970. 000,00	2	1.984. 257,00	2	1.970. 000,00	2	1.970. 000,00	2	1.970. 000,00	10	10.864. 257,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		terhadap peraturan pengelolaan limbah B3																
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNG AN DAN PENGELOLAA N LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																		
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Penilaian terhadap ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Satuan indikator Usaha/Kegiat an merekpresenta sikan satuan	(Jumlah pelaku usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota / Jumlah target usaha yang dilakukan pemantauan dan pembinaan) x 100%	65	Usa ha/ kegi atan	67	5.250. 000,00	68	5.257. 203,00	69	5.250. 000,00	70	5.250. 000,00	71	5.250. 000,00	71	26.257. 203,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																		
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi SDM bidang lingkungan hidup	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif	Penilaian kelompok masyarakat penggiat lingkungan yang aktif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kelompok masyarakat penggiat lingkungan yang aktif diidentifikasi berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dan yang ikut serta dalam bidang lingkungan hidup.	(Jumlah kelompok masyarakat penggiat lingkungan yang aktif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup / Jumlah kelompok masyarakat penggiat lingkungan yang dibina terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) x 100 %	NA	Pers en	75	165.00 3.200, 00	75	165.79 5.310, 00	75	135.00 3.200, 00	100	135.00 3.200, 00	100	135.00 3.200, 00	100	735.80 8.110,0 0	
	Persentase Penyuluh lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	ASN yang ditingkatkan kompetensiny a melalui pengikutserta	(Jumlah Penyuluh Lingkungan Hidup yang telah ditingkatkan k ompetensinya / Total Jumlah Penyuluh Lingkungan Hidup) x 100%	100	Pers en	10 0		100		100		100		10 0		10 0		

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		an diklat/sosiali sasi/bimtek yang bertujuan untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap kerja Penyuluh Lingkungan Hidup agar lebih efektif dalam menjalankan tupoksi mereka.																
2.11.08.2.01 - Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																		
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terkait Lingkungan Hidup	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	Penilaian kelompok masyarakat penggiat lingkungan yang dilakukan pembinaan	(Jumlah kelompok masyarakat penggiat lingkungan yang dibina terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup / Jumlah kelompok masyarakat penggiat lingkungan) x 100 %	100	Pers en	10 0	165.00 3.200, 00	100	165.79 5.310, 00	100	135.00 3.200, 00	100	135.00 3.200, 00	100	135.00 3.200, 00	100	735.80 8.110,0 0	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		<i>terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>																
2.11.08.2.01. 0002 - Pendampinga n Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
Terlaksananya a Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah kegiatan pendampingan atau pembinaan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah (pusat/daerah), lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat, sekolah, atau komunitas untuk menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan pada tahun berjalan	2	Dokumen	3	39.633 .400,0 0	3	39.633 .400,0 0	3	39.633 .400,0 0	3	39.633 .400,0 0	3	39.633 .400,0 0	3	198.16 7.000,0 0	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		Hidup (GPBLH)																
2.11.08.2.01. 0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lemba ga masyarakat/k omunitas/kel ompok masyarakat																		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lemba ga masyarakat/k omunitas/kel ompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/ko ta yang terdaftar di kabupaten/ko ta yang ditingkatkan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komu nitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah kelompok/ko munitas masyarakat yang secara aktif mendapatkan pembinaan dari pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatka n kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelomp ok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH pada tahun berjalan	14	Lem bag a	14	125.36 9.800, 00	14	126.16 1.910, 00	14	95.369 .800,0 0	14	95.369 .800,0 0	14	95.369 .800,0 0	14	537.64 1.110,0 0	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
kapasitas dan Kompetensi SDM nya																		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGA AN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																		
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian kelompok masyarakat penggiat lingkungan yang berpartisipasi dalam perolehan penghargaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	(Jumlah kelompok masyarakat penggiat lingkungan yang berpartisipasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup / Jumlah kelompok masyarakat penggiat lingkungan) x 100 %	100	Pers en	10 0	186.11 7.500, 00	100	187.01 0.971, 00	100	156.11 7.500, 00	100	156.11 7.500, 00	100	156.11 7.500, 00	100	841.48 0.971,0 0	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Ko ta																		
Meningkatnya Cakupan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	Jumlah sekolah (SD/ SMP/ SM A/ SMK/ seder ajat) di tingkat kabupaten/ k	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh pada tahun berjalan	61	Pred ikat	66	186.11 7.500, 00	71	187.01 0.971, 00	76	156.11 7.500, 00	81	156.11 7.500, 00	86	156.11 7.500, 00	86	841.48 0.971,0 0	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		ota, provinsi, atau nasional yang berhasil meraih predikat Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan) berdasarkan penilaian kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam periode waktu tertentu (tahunan atau multi-tahun)																
	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	Predikat ini diberikan setelah kelurahan memenuhi serangkaian kriteria dan standar tertentu, yang mencakup aspek kebersihan, keindahan, pengelolaan sampah, ruang	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh pada tahun berjalan	55	Predikat	56		57		58		59		60		60	-	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		terbuka hijau, partisipasi masyarakat, dan inovasi lingkungan, yang diberikan oleh KLH dan DLH Provinsi jawa timur																
2.11.09.2.01. 0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/D unia Usaha/Dunia Pendidikan/Fi lantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
Terlaksananya a Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/D unia Usaha/Dunia Pendidikan/Fi lantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Masyarakat/Lemb aga Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan/Filant ropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah entitas (perorangan, kelompok masyarakat, lembaga, perusahaan, institusi pendidikan, atau organisasi filantropi) yang telah	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH pada tahun berjalan		Enti tas	5	186.11 7.500, 00	5	187.01 0.971, 00	5	156.11 7.500, 00	5	156.11 7.500, 00	5	156.11 7.500, 00	5	841.48 0.971,0 0	

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota yang telah diverifikasi, dicatat, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (DLH/Dinas Lingkungan Hidup) atau instansi terkait melalui proses investigasi, mediasi, penegakan hukum, atau solusi administratif	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola pada tahun berjalan	1	Pen gad uan	1	1.500.000,00	1	1.507.201,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	5	7.507.201,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAA N PERSAMPAHA N																		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase cakupan layanan persampahan	Indikator ini mengukur proporsi penduduk atau wilayah yang telah menerima layanan persampahan yang memadai yang diselenggarak an oleh perangkat daerah. Layanan ini mencakup pengumpulan , pengangkuta n, dan/atau pengelolaan akhir sampah dari TPS hingga ke TPA.	Kalkulator SIPSN	98,0 1	Pers en	98, 14	20.491 .458.4 32	98, 24	20.589 .829.1 89	98, 32	10.130 .886.8 04	98, 42	9.875. 787.98 6	98, 52	10.992 .107.1 28	98, 14	72.080. 069.53 9,00	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah																		
Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase sampah berkurang	Persentase pengurangan jumlah sampah (dalam ton)	((Volume sampah yang dikelola berbasis 3R / timbulan sampah) x 100%)		Pers en	17, 16	20.491 .458.4 32	17, 52	20.589 .829.1 89	17, 77	10.130 .886.8 04	18, 2	9.875. 787.98 6,00	18, 56	10.992 .107.1 28	18, 56	72.080. 069.53 9,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah individu, kelompok masyarakat (seperti kader lingkungan, komunitas, atau organisasi lokal), dan pihak terkait (LSM, dunia usaha, akademisi, dll.) yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti pemilahan, daur ulang, pengomposan , bank sampah, atau edukasi pengurangan sampah, dalam periode waktu tertentu	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat pada tahun berjalan	3	Kelo mpo k	3	347.45 3.663, 00	3	347.45 3.663, 00	3	347.45 3.663, 00	3	347.45 3.663, 00	3	347.45 3.663, 00	3	1.737.2 68.315, 00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		(harian, bulanan, atau tahunan)																
2.11.11.2.01. 0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA,	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat	Jumlah sampah (dalam ton) yang berhasil dipilah dan diolah di berbagai fasilitas pengelolaan sampah, termasuk tetapi tidak	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada tahun berjalan	180, 92	Ton	0	-	186 ,92	500.00 0,00	189 ,92	500.00 0,00	192 ,92	500.00 0,00	195 ,92	500.00 0,00	19	2.000.0 00,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	terbatas pada TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan , biodigester, bank sampah, dan fasilitas lain yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan,																
2.11.11.2.01. 0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SP A Kabupaten/K ota																		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan , Pengangkuta n, Pengolahan, dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir pada tahun berjalan	11	Unit	11	13.500 .466.6 00	11	13.580 .337.3 57	11	3.121. 394.97 2,00	11	2.866. 296.15 4,00	11	3.982. 615.29 6,00	55	37.051. 110.37 9,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		Menteri Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah di Indonesia																
2.11.11.2.01. 0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ko ta																		
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ko ta	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/K ota yang Disusun dan Ditetapkan merujuk pada pengukuran kuantitatif atau kualitatif terhadap jumlah dokumen resmi yang berisi kebijakan dan strategi pengelolaan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan pada tahun berjalan	0	Dok ume n	0	-	1	2.000. 000,00	1	2.000. 000,00	1	2.000. 000,00	1	2.000. 000,00	4	8.000.0 00,00	

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
sampah melalui pengumpulan sampah																		
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase wilayahyang telah terjangkau oleh layanan pengumpulan sampah formal dari total wilayah layanan yang seharusnya dilayani dalam suatu wilayah administrasi	Persentase luas layanan pengumpulan sampah pada tahun berjalan	90	Pers en	91, 20	6.643. 538.16 9,00	91, 50	6.643. 538.16 9,00	91, 70	6.643. 538.16 9,00	92, 00	6.643. 538.16 9,00	92, 20	6.643. 538.16 9,00	92, 20	33.217. 690.84 5,00	
2.11.11.2.01. 0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesanak hir sampah di TPA/TPST kabupaten/ko ta atau TPA/TPST Regional																		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ko ta atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupat en/kota atau TPA/TPST Regional	Total berat (dalam ton) sampah yang telah diterima dan diproses secara akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional pada tahun berjalan	231 53,7 8	Ton	0	-	234 55, 34	10.000 .000,0 0	236 11, 74	10.000 .000,0 0	237 17, 04	10.000 .000,0 0	238 35, 72	10.000 .000,0 0	946 19, 84	40.000. 000,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONA L	FORMULASI PERHITUNGAN	BAS ELI NE 202 4	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
		Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat kabupaten/kota maupun regional, melalui metode pengolahan yang sesuai dengan standar teknis pengelolaan sampah																

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
1	Memfasilitasi pengelolaan sampah dan limbah berbasis Masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan adalah alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai keberhasilan atau pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu daerah atau instansi, khususnya perangkat daerah, yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra). Indikator ini berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja secara objektif, sehingga dapat memastikan komitmen terhadap pencapaian target pembangunan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) DLH merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan perangkat daerah mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 sebagaimana pada Tabel 4.4. Selain itu pada subbab ini juga memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri yang mengatur tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana pada tabel 4.5.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.	$IKA = \sum_{i=1}^n W_i I_i$ Keterangan: W_i = Bobot parameter i I_i = Nilai dari parameter i	Indeks	56,11	69,47	69,57	69,67	69,77	69,87	69,97	69,97	
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{IKA} - 0,01) \right)$ $I_{IKA} = \text{Rata} - \text{rata} (\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2 + \text{Indeks } PM_{2,5})$ $\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata} - \text{rata } NO_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata} - \text{rata } SO_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks } PM_{2,5} = \frac{\text{Rata} - \text{rata } PM_{2,5}}{\text{Baku Mutu INA}}$	Indeks	89,79	79,59	79,69	79,79	79,89	79,99	80	80	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut.	IKL = IKTL + Faktor koreksi gambut	Indeks	34,13	39,55	39,55	39,56	39,56	39,56	39,56	39,56	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan sampah di suatu wilayah Kota	Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (kalkulator)	poin	61,7	61,7	61,7	61,7	62	62	62	62	

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	Indeks	64,94	67,02	67,09	67,17	67,25	67,33	67,41	67,41	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan sampah di suatu wilayah Kota	Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (kalkulator)	poin	61,7	61,7	61,7	61,7	62	62	62	62	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Blitar - Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan - Yang dimaksud dengan izin PPLH (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota Blitar ----- ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	Persen	65	66	67	68	69	70	71	71	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis DLH Kota Blitar Tahun 2025–2029 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi DLH Kota Blitar dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen Renstra DLH Kota Blitar menjabarkan perencanaan strategis dan hal-hal yang hendak dicapai dalam periode tersebut, dan langkah strategis yang akan dilakukan agar tujuan dan sasaran hingga program dapat tercapai serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025–2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib sesuai dengan tugas dan fungsi Dinperpusip, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra DLH Kota Blitar Tahun 2025–2029 digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dalam kurun waktu masa perencanaan tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 2025–2029 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2025–2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien
2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025–2029 disusun memperhatikan perkembangan isu global, nasional, regional dan dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran Kota Blitar tahun 2025–2029
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan
4. Penyusunan program dan kegiatan harus mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan telah diselaraskan dengan kinerja yang diharapkan di tingkat pusat dan provinsi
6. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan yang melibatkan seluruh bidang
7. Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan perubahan Renstra yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025–2029 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan

tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Blitar sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar.